



MEMBANGUN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN ADMINISTRASI PENDUDUK DESA PIRIANG TAPIKO

Article history

Received: 19 September 2022

Revised: 26 September 2022

Accepted: 28 September 2022

DOI:10.35329/sipissangngi.v2i3.3636

^{1*}Akhmad Qashlim, ²Andriani, ²Abdul Asis, ²Aco Dahrul, ¹Muhajir, ¹Mamat, ³Piansar.

¹Program Studi Sistem Informasi, ²Program Studi Ilmu Pemerintahan, ³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

qashlim@mail.unasman.ac.id

Abstrak

Keinginan masyarakat sebagai warga sipil untuk mendapatkan layanan yang baik menjadi sederhana dan lancar dengan upaya pemberian layanan digital dan upaya ini semakin diprioritaskan oleh pemerintah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten hingga pemerintah desa. Layanan pemerintah digital atau disebut juga e-government merupakan upaya transformasi digital dalam memberikan layanan di dalam pelaksanaan pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan E-Govermen kepada Pemerintah Desa Piriang Tapiko dilaksanakan dengan metode Pendampingan, Pendidikan dan Pelatihan, baik kepada Aparat Desa, Masyarakat umum dan juga kepada siswa(i) tingkat SMP dan SMA yang ada di Desa Piriang Tapiko. Hasil kegiatan ini akan menerapkan tujuh layanan berbasis teknologi informasi antara lain Pengusulan KTP Baru, Pengusulan Kartu Keluarga, Keterangan Domisili, Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Kematian, Laporan Pemerintah Desa, Jaringan Aspirasi Rakyat, walaupun belum maksimal dan masih dalam tahap pelatihan upaya ini telah memberikan pengalaman baru bagi warga dan menjadi alat edukasi untuk melek teknologi. Dengan layanan digital, pemerintah dapat menyampaikan informasi dan layanan kepada warga kapan saja, di mana saja, dan di platform atau perangkat apa pun.

Kata kunci: . *Sistem Pemerintahan, E-Governmen, Teknologi Informasi, Desa Piriang Tapiko*



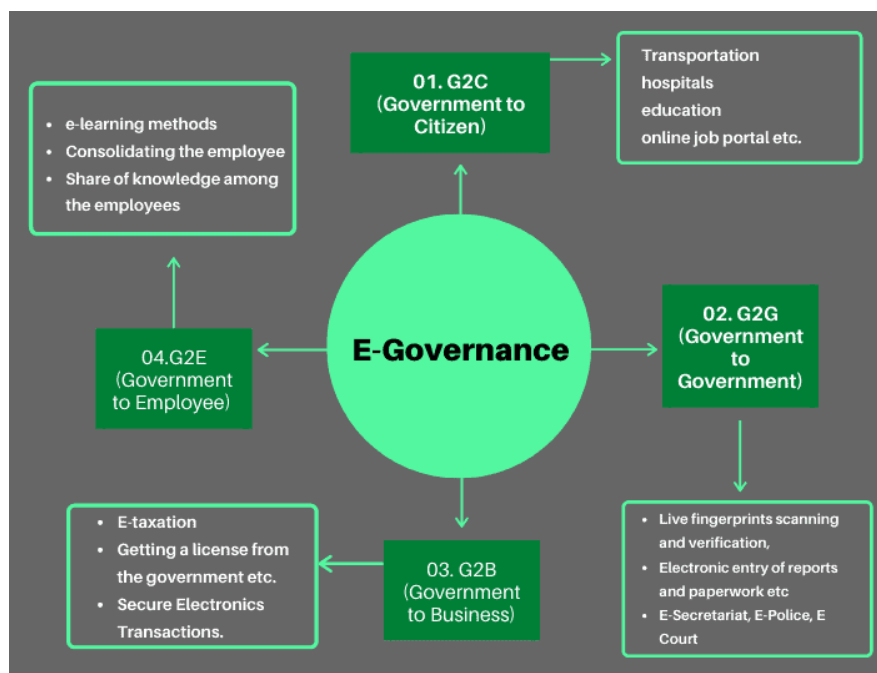
Gambar 1. Pengenalan E-Government kepada Warga, Tokoh Pemuda, dan Siswa(i) Desa Pirian Tapiko

1. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma baru telah dikembangkan di bidang pemerintahan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang disebut Electronic-Government atau E-Government dan telah menjadi salah satu inisiatif paling modern untuk membangun tata pemerintahan yang baik. Saat ini, fitur E-Government dikembangkan hampir di semua negara baik negara maju, negara berkembang maupun negara terbelakang dengan tujuan untuk mendorong proses perkembangan mereka (Biswas, 2022)

E-government sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan e-Government untuk mendukung good governance (termasuk transparansi dan akuntabilitas publik) dan mempercepat proses demokrasi (Wijaya, J.H., dkk., 2022). Kemudian, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (M, P, Damanik, E, H, Purwaningsih, 2017). Maka untuk mewujudkan hal tersebut proses pemerintahan dapat mengandalkan akses informasi memberikan pelayanan yang transparan, adil, dan akuntabel kepada warga (Zempi, dkk., 2022) selain itu tujuan utamanya memfasilitasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan melalui sarana elektronik seperti e-mail, website, konektivitas SMS, dan lain-lain (Zempi, dkk., 2022; Biswas, 2022).

E- Government dapat dianggap sebagai kebijakan inklusif sosial untuk pengembangan transparansi dan akuntabilitas masyarakat dan administrasi. Kebijakan ini mencakup penyediaan layanan kepada masyarakat dengan pengumpulan informasi melalui pengembangan kelembagaan dan komunikasi (Zahro, dkk., 2022). E- Government dapat menyediakan fitur atau modul dalam beberapa cara, diuraikan pada gambar 2 (Biswas, 2022).



Gambar 2. Tipe E-Government (Biswas, 2022)

Layanan pada E- Government dapat dilihat pada gambat 2 yaitu: G2C (Government to Citizen), G2G (Government to Government), G2B (Government to Business) , G2E (Government to Employee). Pada kegiatan kegiatan pengabdian fokus rancangan pada G2C

yaitu konsep e-governments yang menghubungkan antara pemerintah dengan warga negara melalui tatanan yang transparan dan akuntabel (M, P, Damanik, E, H, Purwaningsih, 2017). Dalam hubungan ini pemerintah bertanggung jawab untuk memajukan kesempatan sosial dan pelayanan publik untuk kepentingan administrasi masyarakat. Tujuan utama dari layanan G2C adalah untuk memastikan pemerataan informasi untuk semua, penerimaan umpan balik warga, dan meningkatkan layanan kesejahteraan (Sukmana, E, 2022).

E-government merupakan salah satu sektor prioritas Pembangunan Pitalebar Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. Pada Pasal 7 dicantumkan prioritas pembangunan Pitalebar Indonesia pada lima sektor, seperti e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik dan e-Pengadaan (Zahro, dkk., 2022; Wijaya, J. H. 2022). Sehingga terlihat jelas bahwa e-government sudah menjadi hal yang penting untuk diterapkan di berbagai bidang pemerintahan. Kemudian, merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional dan ayat (4) dijelaskan bahwa Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja (Mustika, dkk., 2022). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dengan dilaksanakannya e-government akan mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat melahirkan pemerintahan yang berdaya guna dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat (Anggraeni dan Purnamasari, 2022)

2. METODE

Menerapkan e-government melalui beberapa bagian dan setiap bagian memiliki tahapan sendiri. Adapun bagian dan tahapan tersebut mengikuti proses pengembangan infrastruktur e-governmen dan sumberdaya manusia (Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022) sebagai disajikan pada tabel 2.1

2.1. Tahap pengembangan E-Governmen

Pengembangan e-governmen mengikuti proses tahapan sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tahapan Pengembangan e-Government

Tahap Pengembangan	Aktifitas	Indikator	Capaian
Suprastruktur e-government	kepemimpinan manajemen lembaga (e-leadership)	Komitmen Pemimpin dalam penerapan E-Government	Penyediaan sarana dan prasarana sebagai bentuk komitmen
	sumberdaya manusia (human resources)	Pembinaan Sumber daya manusia untuk keterampilan IT	Pelatihan literasi digital untuk meningkatkan keterampilan IT
	Peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government	Perumusan Rencana Peraturan Desa tentang implementasi layanan berbasis	Draf peraturan Desa tentang implementasi layanan berbasis eletronik e-

	(regulation)	eletronik e-government	government
Infrastruktur jaringan	Merancang protokol komunikasi, topologi jaringan	Terdapat Topologi jaringan internet desa	Optimasi jaringan internet desa
Infrastruktur informasi	Membangun struktur dan format data, data sharing, sistem keamanan	Rancangan Database sistem	Akses database untuk mendapat informasi layanan desa
Infrastruktur aplikasi	Merancang aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (interface), dan aplikasi back office	Terdapat prototype antarmuka aplikasi pada masing-masing level dan modul sistem	Sistem dapat diakses walaupun belum maksimal

2.2. Tahap Peningkatan SDM

Pelatihan peningkatan keterampilan dan kapasitas individu dalam menggunakan Teknologi Informasi bagi warga dan perangkat desa dilakuakn melalui proses pada tabel 2.2.

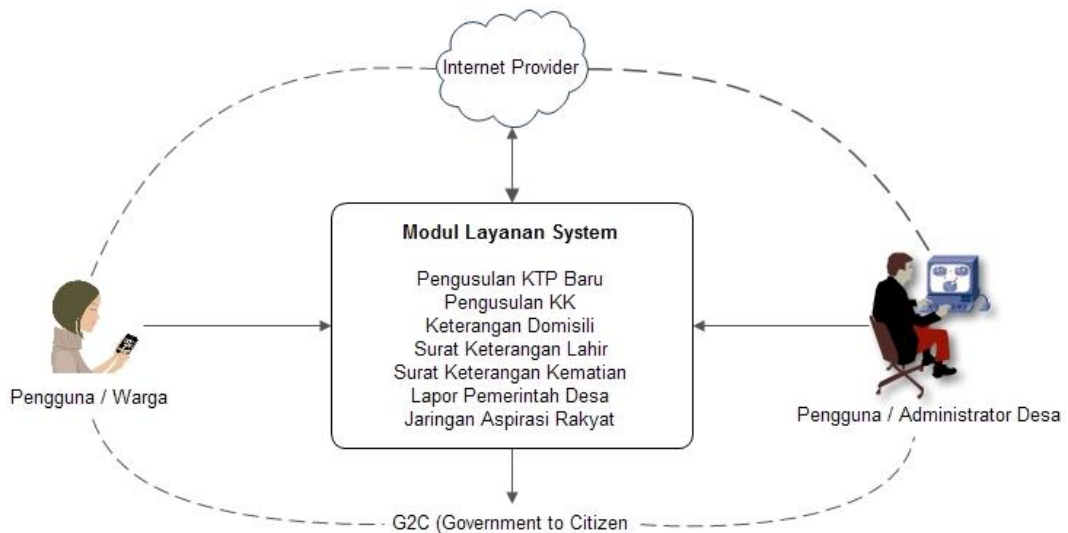
Tabel 2.2. Tahap Openingkatan SDM

Tahap Pengembangan	Aktifitas	Metode Pendekatan	Capaian
Pelatihan dan Pendampingan	Pembentukan jejaring	FGD, Pembelajaran kelas dan pembelajaran Lapangan, studi kasus, diskusi	Pembentukan Masyarakat Sadar Budaya
		Melibatkan praktisi kebudayaan dan akademisi sebagai instruktur, fasilitatos dan masyarkat umum sebagai peserta	Adanya Boyang Literasi sebaga tempat belajar tentang Literasi Digital
Pengembangan Program Pendampingan	Workshop pengguna e-goverment sistem	Praktek penggunaan e- government	Kemampuan dalam menggunakan e- government sistem
		Melibatkan pemuda, peserta didik dan masyarkat umum dalam kegiatan	Modul penggunaan e-goverment sistem
Pengembangan Program Pendampingan	Pembuatan Kelas Literasi pada Boyany Literasi yang diikuti oleh toko pemuda atau warga belajar	Pembelajaran kelas dan pembelajaran Lapangan, studi kasus, diskusi	Peningkatan kapasitas dan keterampilan penggunaan informasi misalnya penggunaan e- commerce untuk pemasaran produk pertanian desa
		kebudayaan dan akademisi sebagai instruktur, fasilitatos dan masyarkat umum sebagai peserta	Piriang Tapiko

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Infrastruktur E-Government Desa Piriang Tapiko

Teknologi Informasi yang dibangun terdiri Perangkat Keras berupa sarana dan prasarana penunjang, aplikasi sistem informasi dalam hal ini e-government, Internet provider dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Untuk menggambarkan infrastruktur sistem e-government yang dibangun maka dapat dilihat ada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Infrastruktur E-Government Desa Piriang Tapiko

Gambar 3.1. menunjukkan level pengguna sistem yaitu pengguna dari kalangan warga atau masyarakat Desa Piriang Tapiko yang dapat mengakses sistem e-government melalui platform smartphone android yang terhubung ke mitra penyedia layanan internet. Layanan yang dapat diakses dapat dilihat pada tabel 1 point 3.2. Permintaan layanan melalui modul sistem tersebut akan di terima oleh administrator desa, proses ini dapat berlangsung secara *real time* dapat pula diatur secara berkala, sesuai ketentuan pemerintah desa Piriang Tapiko. Model sisten ini adalah *Government to Citizen* (G2C).

3.2. Implementasi Layanan pada E-Government

Sistem aplikasi e-government yang telah dirancang telah berjalan walaupun belum sepenuhnya dan masih bersifat *trial and error* atau simulasi. Sistem telah diperkenalkan melalui kegiatan literasi digital untuk menciptakan masyarakat melek teknologi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat (Qashlim, skk., 2021). Adapun beberapa layanan yang disediakan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Layanan Birokrasi Desa yang Menuju Transformasi Digital

No	Jenis Layanan	Model Layanan Lama	Model Layanan Baru	Progress
1.	Pengusulan KTP Baru	Penduduk datang ke Kantor Capil Kabupaten	Sistem Aplikasi	80%
2.	Pengusulan KK	Penduduk datang ke Kantor Capil Kabupaten	Sistem Aplikasi	80%

No	Jenis Layanan	Model Layanan Lama	Model Layanan Baru	Progress
3.	Keterangan Domisili	Penduduk datang ke Kantor Desa	Sistem Aplikasi	80%
4.	Surat Keterangan Lahir	Penduduk datang ke Kantor Desa	Sistem Aplikasi	80%
5.	Surat Keterangan Kematian	Penduduk datang ke Kantor Desa	Sistem Aplikasi	80%
6.	Lapor Pemerintah Desa	Penduduk datang ke Kantor Desa	Sistem Aplikasi	70%
7.	Jaringan Aspirasi Rakyat	Penduduk datang ke Kantor Desa	Sistem Aplikasi	65%

Catatan: Data layanan belum sepenuhnya maksimal

Terdapat tujuh modul sistem atau layanan yang dapat diakses oleh masyarakat, 5 diantaranya merupakan layanan administrasi penduduk dan 2 diantaranya yaitu Lapor Pemerintah Desa dan Jaringan Aspirasi Rakyat merupakan modul untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan pemerintah desa yang dapat dimanfaatkan sebagai modul untuk mengontrol sistem pemerintahan yang berlangsung di desa.

Implementasi sistem ini telah memberi perubahan dan akan menuju transformasi digital dari model pelayanan yang lama atau konvensional menuju layanan berbasis aplikasi sistem e-government. Sistem belum berjalan 100% dan masih dalam tahap proses penyelesaian sembari melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat.

3.2. E- Government : Inovasi dalam Strategi Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan penerapan e-government telah memberi perubahan terhadap paradigma masyarakat yang sebelumnya komunikasi antara pemerintah desa dengan warga dianggap terasa berlangsung satu arah. Dengan adanya e-goverment komunikasi dapat berlangsung dua arah dari pemerintah desa ke masyarakat dan atau sebaliknya. Dari sinilah lahirnya perubahan atau transformasi digital dalam sistem kerja pemerintah yang kini mulai berbasis teknologi dan pengelolaan informasi untuk strategi komunikasi.

Adanya komunikasi dua arah dalam proses pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi merupakan bentuk inovasi Pemerinta Desa Piriang Tapiko dalam strategi komunikasi kepada masyarakat, yang secara langsung akan bermanfaat dalam menunjang terlaksananya peran dan fungsi sistem pemerintahan desa, dan masyarakat tentunya akan memperoleh manfaat berupa peningkatan efektifitas dan efisiensi, kenyamanan dan kepuasan, serta aksesibilitas dan visibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintah Desa Piriang Tapiko.

3.3. E-Government Sebagai Strategi Pelayanan Publik di Tengah Kondisi COVID-19

Efektifnya penggunaan internet di Desa Piriang Tapiko menciptakan pengetahuan baru bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi penyampaian informasi, dalam penyelenggara pelayanan publik. Kondisi COVID-19 yang menciptakan banyak batasan dalam interaksi sosial bukan lagi sebagai penghambat bagi penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan semakin dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi e-government (Wismayanti, K. W. D., & Purnamaningsih, P. E., 2022) memberikan pengetahuan dan pengalaman baru dalam berkomunikasi secara daring.

4. SIMPULAN

Eletronic Government sebagai bentuk inovasi desa telah memberikan peluang dan prestasi bagi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Desa Piriang Tapiko baik kepada masyarakat maupun mitra desa dari kalangan swasta. Sementara itu masyarakat telah mendapatkan pengalaman dan cara baru dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah desa walaupun masih dalam pengembangan dan belum maksimal dalam implementasi. Untuk keberlanjutan dari program pengabdian ini akan direncanakan sistem untuk peningkatan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa hingga sistem integrasi desa dengan pemerintah kabupaten.

Kesadaran pemerintah desa dan warga desa Piriang Tapiko mengenai E-government sangat penting diterapkan tetapi harus didukung oleh pertama, komitmen pemimpin, hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service). Kedua, sarana dan prasarana, berupa ketersediaan komputer/laptop, jaringan internet, dan sebagainya. Ketiga, sumber daya manusia, yang memiliki keterampilan dibidang teknologi informasi diperlukan dalam proses pelaksanaan e-government.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Novi, Purnamasari, Hanny , 2022, Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Pada Aplikasi Sapa Cetar, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2009-2014>.
- Biswas, Avijit, 2022, E-Governance: Meaning, Objectives, Features, and 4 Types, School Political Science. <https://schoolofpoliticalscience.com/what-is-e-governance/>
- Mustika, M. E. S., Choiriyah, I. U., & UB, A. R. (2022). The Implementation of E-government in the Sector Transportation (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District). JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 10(1), 54-63. <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1688>
- M, P, Damanik, E, H, Purwaningsih, 2017, E-Government and Its Application in Local Government (Case Study Towards Information Quality on Bengkalis Regency Website, Riau Province), Jurnal Studi Komunikasi dan media. Vol. 21 No. 2, 151 – 164, <https://jurnal.kominfo.go.id/>
- QASHLIM, A., ASIS, A., & ANDRIANI, A. (2021). Internet Masuk Desa: Sebuah Upaya Literasi Digital Untuk Menciptakan Masyarakat Melek Teknologi Pada Desa Piriang Kecamatan Tutar. *SIPISSANGNGI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 1(1), 61-70. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/sipissangngi/article/view/1986>
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan: E-Government. *JURNAL FASILKOM (teknologi inFormASi dan Ilmu Komputer)*, 12(1), 14-19. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JIK/article/view/3512>
- Sukmana, E. (2022). Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dan Kepuasan Masyarakat Berbasis Website Di Era Pandemi Di Kabupaten Sumedang. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2). <https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/jisipol/article/view/807>
- Wismayanti, K. W. D., & Purnamaningsih, P. E. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era New Normal Pada Pemerintah Daerah Badung. *Media Bina Ilmiah*, 16(10), 7507-7518.

<http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/1>.

- Wijaya, J. H. (2022). Perspektif Governance Dalam Perkembangan E-Government Di Indonesia Tahun 2003-2020 (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD"). <http://repo.apmd.ac.id/1825/>
- Wijaya, J. H., Yunanto, S. E., Setyowati, Y., & Supardal, S. (2022). E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1), 37-53, <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/27>
- Zahro, S. R. A., Nurjanah, N., & Mutmainah, N. (2022). Penerapan E-Government melalui Sectoral Protocol System guna Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(1), 341-364. <https://ojs2.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/32871>
- Zempi, Chairun, Nisa, Maryam, Siti., Priyono, 2022, E-Government Sebagai Realisasi Sistem Jaringan Terdesentralisasi Di Indonesia: Implikasi Sosial Dan Politik, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA* Vol 6 No 1. <https://journals.upi-yai.ac.id>